

ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA KANTOR KECAMATAN KALIDONI PALEMBANG 2012-2014

Bernika Ifada Puti Nz¹⁾, Jamiyla²⁾, Endah Meiria³⁾

^{1) 2) 3)}Program Studi Akuntansi Universitas Indo Global Mandiri

Jl Jend. Sudirman No. 629 KM. 4 Palembang

Email : putribernika@yahoo.co.id¹⁾, miyla@ymail.com²⁾, endah.meiria@gmail.com³⁾

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine Budget and Expenditure realization at the Kalidoni District Office in Palembang. Variable of this study was realization of Budget and Expenditure during 2012-2014. The subjects are the Budget and Expenditure at the Kalidoni District Office in Palembang. The method of this study was descriptive methods and data collection techniques were documentation and interviews. The data source of this study were the employees at Kalidoni District Office. The results of this study indicate that the realization of Budget and Expenditure District of Kalidoni Palembang, the ratio of income and unstable realization were 96% in 2012, 58% in 2013 and 85% in 2014. For the ratio of budget and realization in 2012 of 85%, in 2013 by 88% and in 2013 is 92%. The ratio of expenditure and realization were 89% in 2012, 68% in 2013 and 472% in 2014. The independence ratio were 110% in 2012, 203% in 2013 and 714% in 2014. Effectiveness ratio were 91% in 2012, 66% in 2013 and 9,8% in 2014. Efficiency ratio were 70% in 2012, 72% in 2013, and 87% in 2014. In general, the realization of the budget and expenditure in Kalidoni district is good enough, the level of independence is good, but the level of effective and efficient in the District Kalidoni is still not included in the criteria.

Keywords : Realization, Budget, Expenditure

1. Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah Negara yang wilayahnya terbagi atas daerah - daerah Provinsi, daerah Provinsi tersebut dibagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang. Terselenggaranya pembangunan yang merata diseluruh tanah air tidak mungkin sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah pusat, karena itu pemerintahan pusat telah mengambil langkah kebijakan yang dikenal dengan azas desentralisasi. Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagian kekuasaan Presiden tersebut diserahkan kepada Gubernur, Bupati atau Walikota selaku pengelola keuangan daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup untuk daerah, dengan mengacu pada Undang-undang yang mengatur keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antar pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Menurut Dina (2012:47) ^[2] Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memuat petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sasaran yang dimuat dalam APBD harus sesuai dengan fungsi belanja, standar pelayanan yang diharapkan, dan perkiraan biaya kegiatan yang bersangkutan. APBD harus memuat bagian pendapatan yang digunakan untuk membiayai biaya administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/investasi. Apabila sasaran tersebut dimuat APBD tersebut akan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat daerah. Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.

Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran. Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sering terjadi anggaran yang sudah diterima kurang efektif penggunaannya karena kurangnya kontrol yang ketat dari pemerintahan pusat secara berkala sehingga dana belanja daerah menjadi sia-sia.

Salah satu cara perusahaan dalam pengelolaan Menurut Abdul Halim ^[4](2004 : 150-158) dan Direktorat Pengelolaan Keuangan Daerah (Departemen Keuangan RI, 2006) mengemukakan beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain Rasio Pendapatan dan Realisasi, Rasio Belanja dan Realisasi, Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga

dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Persamaan yang dapat diambil antara rasio keuangan komersial dengan rasio keuangan daerah adalah sama-sama mengukur tingkat keefektifan dan keefisienan atas kegiatan yang dilaksanakan dan biaya yang dikeluarkan agar dapat memperoleh hasil (*outcome*) pada organisasi pemerintah dan hasil (*profit*) pada organisasi swasta yang maksimal. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi peningkatan atau kemajuan kinerja suatu organisasi, baik organisasi swasta maupun organisasi publik. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejala ketidakpuasan. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawabannya yang diberikan oleh pemerintah. Dengan kata lain, kinerja pemerintah kini lebih banyak mendapatkan sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan pemerintah. Pengukuran kinerja pemerintah bertujuan untuk menilai sejauh mana mereka mampu menyediakan produk (jasa) yang berkualitas dengan biaya yang layak. Bagi organisasi pemerintah, kinerja pelayanan publik merupakan salah satu penilaian atas keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti yaitu bagaimana realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Kalidoni berdasarkan analisis rasio Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012-2014.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kantor Kecamatan Kalidoni Tahun Anggaran 2012-2014.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder. Dimana sumber data primer melalui wawancara kepada pihak yang terkait, sumber data sekunder yaitu berupa sejarah singkat perusahaan, aktivitas dan struktur organisasi serta uraian tugas tiap-tiap bagian dalam struktur organisasi, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Kalidoni.

Penulis menggunakan teknik studi pustaka, dimana pengumpulan data di ambil dari berbagai buku-buku mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, buku-buku tentang Kecamatan Kalidoni, dan buku-buku tentang rasio realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selain itu penulis juga menggunakan tehnik lapangan seperti wawancara dan kuisioner yang berupa daftar pertanyaan yang peneliti ajukan, serta yang dilaksanakan langsung dengan staf karyawan Kecamatan Kalidoni Palembang, mengenai Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Teknik analisis data yang dipilih ^[11] adalah Teknik analisis data kuantitatif, yaitu data yang datanya bersifat angka-angka statik yang dapat dikuantifikasi. Data tersebut berbentuk variabel - variabel dan operasionalisasinya dengan skala ukuran tertentu misalnya skala nominal, ordinal, interval dan ratio.

Teknik analisis data kualitatif, ^[12] yaitu data yang bersifat deskriptif maksudnya data berupa gejala-gejala yang di katagorikan ataupun dalam bentuk lainnya seperti foto, dokumen, artefak dan catatan-catatan lapangan saat penelitian dilaksanakan

Dalam penelitian ini, data yang digunakan penulis yaitu teknik analisis data kuantitatif, dimana penulis menggunakan data yang berbentuk variabel-variabel dan oprasionalisasinya degan skala ukuran rasio.

Kajian Pustaka

Kajian pustaka memuat bahasan mengenai landasan teori relvan dengan permasalahan yang dianalisis.

a) Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan suatu alat untuk perencanaan dan pengawasan operasi keuntungan dalam suatu organisasi laba dimana tingkat formalitas suatu budget tergantung besar kecilnya organisasi. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.

Menurut Freeman (2003) dalam Nordiawan (2009:48),^[9] anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resources to unlimited demands*). Menurut *Governmental Accounting Standards Board (GASB)* dalam Bastian (2005:164),^[11] definisi anggaran (*budget*) adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Menurut Abdul Halim ^[6] (2012:22), anggaran adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut. Dari definisi di atas dapat disimpulkan pengertian anggaran adalah pedoman yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam satu periode demi kepentingan masyarakat.

b) Anggaran Sektor Publik

Menurut Abdul Halim ^[5] Anggaran bagi sektor publik adalah alat untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter, proses penganggaran organisasi sektor publik

dimulai dari perencanaan strategis dan perencanaan operasional.

Anggaran sektor publik adalah suatu rencana kerja yang dibuat dan digunakan oleh Pemerintah, baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk ukuran financial, yang memuat informasi mengenai pendapatan, belanja, aktivitas, dan pembiayaan, dalam satuan moneter.

c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Dina ^[2] (2012:47) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Secara garis besar, struktur APBD terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah Semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sebaliknya, semua pengeluaran dan rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali merupakan definisi dan belanja daerah.
2. Belanja Daerah Belanja Daerah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung.

d) Realisasi APBD dalam Kecamatan

Menurut Tanjung ^[3](2007:21) rencana kerja dari rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaku pejabat pengguna anggaran Kecamatan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Menyusun RKA-SKPD.
2. Menyusun DPA-SKPD.
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban dan anggaran belanja.
4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
5. Melakukan pengujian atas tagihan yang dipimpinnya.
6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas dipimpinnya.
8. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
9. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
10. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
11. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
12. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

2. Pembahasan

Bab ini membahas permasalahan yang ada yaitu mengenai Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kantor Kecamatan Kalidoni Palembang

a) Rasio Anggaran Pendapatan dengan Realisasi

Rasio ini menggambarkan perbandingan anggaran Realisasi yang digunakan untuk mengetahui berapa persen anggaran tersebut dapat terealisasi.^[7] Perhitungannya dapat dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Tingkat pencapaian} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Rencana Pendapatan}} \times 100\%$$

Dari rumus di atas, dapat dilihat perhitungan Rasio anggaran pendapatan dan realisasinya tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 dari tabel berikut:

Tabel 1. *Persentase Selisish Pendapatan*

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	2012	Rp.2.003.108.069	Rp1.713.091.239	85%
2.	2013	Rp.1.780.546.000	Rp1.571.919.334	88%
3.	2014	Rp.363.400.000	Rp. 335.335.000	92%

Dari tabel perhitungan di atas, tingkat pencapaian pendapatan pada tahun 2012 pendapatan anggaran sebesar Rp. 1.580.972.415 dan terealisasi hanya 96%, untuk tahun 2013 pendapatan anggaran meningkat sebesar Rp. 1.780.546.000 tetapi yang terealisasi hanya 58% saja, pada tahun 2014 pendapatan anggaran menurun lagi menjadi Rp. 1.863.423.556 dan terealisasi 85%. Pendapatan anggaran yang berubah-ubah sesuai dari dana APBD dari pemerintah untuk Kecamatan Kalidoni karena banyaknya kebutuhan belanja setiap tahunnya mengakibatkan pendapatan menjadi berubah-ubah setiap tahunnya.

b) Rasio Anggaran Belanja dengan Realisasi

Rasio ini menggambarkan perbandingan anggaran Realisasi yang digunakan untuk mengetahui berapa persen anggaran tersebut dapat terealisasi.^[7] Perhitungannya dapat dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Tingkat pencapaian} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Rencana Belanja}} \times 100\%$$

Dari rumus di atas, dapat dilihat perhitungan rasio anggaran belanja dan realisasinya tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 dari tabel berikut :

Tabel 2. Persentase Selisih Belanja

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	2012	Rp.2.003.108.069	Rp1.713.091.239	85%
2.	2013	Rp.1.780.546.000	Rp1.571.919.334	88%
3.	2014	Rp.363.400.000	Rp. 335.335.000	92%

Dari tabel perhitungan di atas, tingkat pencapaian belanja pada tahun 2012 yaitu sebesar 85% bisa dikatakan baik karena mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian realisasi belanjanya baik, tetapi anggaran belanjanya juga menurun dikarenakan tidak banyak kebutuhan belanja, pada tahun 2013 anggaran belanja meningkat dan realisasinya lebih tinggi dibanding tahun 2012 yang hanya sebesar 85% dan pada tahun 2013 naik menjadi 85%, realisasi anggaran belanja dari tiga tahun terakhir mengalami peningkatan dan penurunan tetapi pada tahun 2014 sudah bisa dikatakan cukup baik karena mendekati 100% yaitu 92% karena kebutuhan belanja juga ikut menurun.

c) Rasio Realisasi Belanja dan Realisasi Pendapatan

Rasio ini menggambarkan tingkat pencapaian antara realisasi belanja dan realisasi pendapatan,^[7] dapat dilihat dari rumus:

$$\text{Tingkat pencapaian} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Realisasi Belanja}} \times 100\%$$

Dari rumus di atas, dapat dilihat perhitungan rasio anggaran belanja dan realisasinya tahun 2012, 2013 dan tahun 2014 dari tabel berikut:

Tabel 3. Perhitungan Selisih Realisasi Pendapatan Dan Realisasi Belanja

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	2012	Rp.2.003.108.069	Rp1.713.091.239	85%
2.	2013	Rp.1.780.546.000	Rp1.571.919.334	88%
3.	2014	Rp.363.400.000	Rp. 335.335.000	92%

Dari tabel perhitungan diatas, ternyata perhitungan menunjukkan realisasi pendapatan yang dibelanjakan pada tahun 2012 sebesar 89% dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan dan belanja tahun 2012 sudah baik dan selisihnya 89% , pada tahun 2013 jumlah pendapatan yang dibelanjakan menurun 68% untuk tahun 2014 pendapatan besar dan belanja hanya sedikit sehingga terealisasi secara maksimal 472%.

d) Rasio Kemandirian

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.^[7] Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain misalnya bantuan pusat ataupun dari

pinjaman. secara keseluruhan rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber daya ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama Pusat dan Provinsi) semakin rendah dan sebaliknya.

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah.

Rasio kemandirian dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{BP4} \times 100\%$$

Keterangan:

RK = Rasio Kemandirian

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BP4 = Bantuan Pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya

Berdasarkan deskripsi diatas dapat hitung rasio kemandirian sebagai berikut:

a. Tahun 2012

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{PAD}{BP4} \times 100\%$$

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{Rp.11.120.000}{Rp.10.050.729} \times 100\%$$

$$= 110\%$$

b. Tahun 2013

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{PAD}{BP4} \times 100\%$$

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{Rp.20.560.677}{Rp.10.125.080} \times 100\%$$

$$= 203\%$$

c. Tahun 2014

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{PAD}{BP4} \times 100\%$$

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{Rp.30.320.420}{Rp.4.245.000} \times 100\%$$

$$= 714\%$$

Dari perhitungan di atas, tahun 2012 menunjukkan rasio kemandirian Kecamatan Kalidoni yaitu sebesar 110% yang kemudian menjadi 203% dan pada tahun 2014 meningkat lagi menjadi 714%, berdasarkan analisis kemandirian bahwa semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan begitu pula sebaliknya. Berdasarkan analisis tersebut, dapat digambarkan bahwa dimulai tahun 2012-2014 tingkat

kemandirian Kecamatan Kalidoni dalam hal pembiayaan daerah cukup baik, hal ini dibuktikan dari persentase yang dihasilkan semakin meningkat setiap tahunnya. karena setiap tahunnya mengalami peningkatan, bisa dilihat juga bahwa bantuan keuangan tidak terlalu banyak.

e) Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah,^[7] dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{RPPAD}{TPPAD} \times 100\%$$

Keterangan:

RPPAD = Realisasi Penerimaan PAD

TPPAD = Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan berdasarkan potensi asli daerah .

Tabel 4. Kriteria Nilai Efektivitas

KRITERIA	PERSENTASE
Sangat efektif	> 100%
Efektif	100%
Cukup efektif	90% - 99%
Kurang efektif	75% - 89%
Tidak efektif	<75%

Dari rumus diatas, dapat dihitung rasio efektivitas sebagai berikut:

a. Tahun 2012

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{RPPAD}{TPPAD} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Rp. 1.713.091.239}}{\text{Rp.1.574.626.618}} \times 100\% = 91\%$$

b. Tahun 2013

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{RPPAD}{TPPAD} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Rp. 1.043.839.420}}{\text{Rp.1.573.602.425}} \times 100\% = 66\%$$

c. Tahun 2014

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{RPPAD}{TPPAD} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Rp. 1.585.751.200}}{\text{Rp. 1.603.776.021}} \times 100\% = 9,8\%$$

Dari perhitungan di atas, rasio efektifitas tahun 2012 adalah sebesar 91% pada tahun 2013 menurun menjadi 66%, dan tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 9,8%. Pada dasarnya didalam analisis rasio efektifitas diketahui bahwa kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikatakan efektif jika rasio yang dicapai minimal

1 dan maksimal 100%. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Sesuai hasil perhitungan rasio di atas dapat digambarkan kemampuan Kecamatan Kalidoni ini dalam menjalankan tugasnya belum terlalu stabil karena mengalami penurunan rasio efektifitas dibawah 100%, ketidakstabilan rasio efektifitas ini disebabkan karena Pemerintah Daerah belum terampil dalam mengontrol rencana dan realisasi terhadap retribusi daerah pada APBD. Realisasi pendapatan yang diterima dari pajak lebih kecil dari yang telah direncanakan.

f) Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi^[7] adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila yang dicapai kurang dari 1 atau di bawah 100 persen.

Semakin kecil yang diterima, maka akan semakin baik realisasi pemerintah daerah. Rasio efisiensi merupakan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memungut Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sedangkan realisasi pendapatan asli daerah adalah jumlah/total pendapatan asli daerah yang diperoleh pada tahun anggaran bersangkutan, dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{BMPAD}{RPPAD} \times 100\%$$

Keterangan:

Rasio Efisiensi = Rasio Efisiensi

BMPAD = Biaya yang dikeluarkan untuk memungut Pendapatan Asli Daerah

RPPAD = Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Tabel 5. Kriteria Nilai Efisiensi

KRITERIA	PERSENTASE
Sangat efisiensi	< 5%
Efisiensi	5% - 10%
Cukup efisiensi	11% - 20%
Kurang efisiensi	21% - 30%
Tidak efisiensi	> 30%

Dari rumus diatas, dapat dihitung Rasio Efisiensi sebagai berikut:

a. Tahun 2012

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{BMPAD}{RPPAD} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Rp. 1.203.489.000}}{\text{Rp. 1.713.091.239}} \times 100\% = 70\%$$

b. Tahun 2013

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{BMPAD}{RPPAD} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Rp. 1.139.321.000}}{\text{Rp. 1.571.919.334}} \times 100\%$$

$$= 72\%$$

c. Tahun 2014

$$\text{Rasio efesiensi} = \frac{\text{BMPAD}}{\text{RPPAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efesiensi} = \frac{\text{Rp. 1.211.200.000}}{\text{Rp. 335.335.000}} \times 100\% = 87\%$$

Rasio efisiensi yang dicapai oleh pemerintah Kecamatan Kalidoni pada tahun 2012, 2013 dan 2014 bisa dikatakan belum efektif karena kriteria persentase rasio efektif jika kurang dari 11% bisa dikatakan efektif, hal yang seperti ini dikarenakan pemerintah terlalu banyak mengeluarkan dana untuk menghasilkan pendapatan asli daerah.

Dari perhitungan diatas, dapat dibuat rekapitulasi rasio keuangan pada tahun 2012, 2013 dan 2014

Tabel 6. Hasil Persentase Rasio Keuangan

Rasio keuangan	Tahun (%)		
	2012	2013	2014
Rasio Anggaran Pendapatan dan realisasi	96%	58%	85%
Rasio Anggaran Belanja dan realisasi	85%	88%	92%
Rasio Realisasi Pendapatan dan realisasi belanja	89%	68%	472%
Rasio Kemandirian	110%	203%	714%
Rasio Efektivitas	91%	66%	9,8%
Rasio Efesiensi	70%	72%	87%

4. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dari masing-masing rasio adalah sebagai berikut:

1. Gambaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Kalidoni menunjukkan pada tahun 2012 yaitu Rasio pendapatan dan Realisasinya, realisasi kecamatan kalidoni cukup baik karena hampir mendekati dari 100%, rasio pendapatan belanja dan realisasinya sudah cukup baik karena hampir mendekati 100%, Rasio realisasi pendapatan dan realisasi belanja sudah baik. Rasio Kemandirian sudah baik karena persentasenya meningkat, semakin meningkatnya persentase maka semakin kecil Kecamatan tersebut tergantung pada bantuan lain-lain. Rasio efektifitas tidak efektif karena Kecamatan Tidak terampil dalam mengontrol rencana dan realisasi terhadap pendapatan.
2. Hambatan-hambatan yang didapat yaitu terlalu banyak proses-proses yang harus dilakukan mulai dari tahap awal penyusunan Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, penyetujuan, pengesahan, yang selanjutnya akan jadi Peraturan Pemerintahan yang memakan waktu banyak dan permasalahan yang timbul dalam proses penyusunan.
3. Sistem pengawasan yang belum efektif akibat belum memadai sumber daya manusia yang diharapkan dengan baik dalam peraturan maupun praktek lapangan.

Daftar Pustaka

- [1] Bastian, Indra. 2005. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- [2] Dina, Aryanto. 2012. *Penganggaran Sektor Publik*. Modul. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- [3] Tanjung, Abdul Hafiz. 2007. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*, Bandung: Penerbit Alfabeta
- [4] Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- [5] -----2009 *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- [6] -----2012. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- [7] Mahmudi. 2011. *Akuntansi sektor Publik*, Yogyakarta: UII Press.
- [8] Marizka, Addina. 2010. *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan*. Skripsi. Tidak Di Publikasikan. Medan: Program Ekonomi Akuntansi Universitas Sumatera Utara.
- [9] Nordiawan, Deddi. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- [10] Nordiawan, Deddi & Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- [11] Pratama, Filli., dkk wati, Ratu Ilma Ina Putri & Nurhayati. 2010. *Metodeologi Penelitian*. Palembang: Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya.
- [12] Soeranto, 2008. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- [13] J.1997. *Metode Riset: Aplikasinya dalam pemasaran*. Edisi 6. Jakarta: Rineka Cipt